

PKM yang Berdampak bagi Kesejahteraan : Mendudukkan Dharma Pengabdian berdasarkan Prinsip dan Nilai sebagai Legacy Kampus Bagi Masyarakat

Agung Winarno^{1*}, Desti Nur Aini², Heida Ifkari Safitri³, Dian Fadilla⁴

^{1,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Malang, 65145, Indonesia

²Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, Malang, 65145, Indonesia

e-mail: *¹agung.winarno.fe@um.ac.id

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) sebagai salah satu dharma perguruan tinggi kerap dipraktikkan sebagai aktivitas kepatuhan struktural yang berorientasi luaran, bukan sebagai mekanisme transformasi sosial yang terukur. Kondisi ini menimbulkan jarak antara klaim kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan dampak faktual yang dapat dibuktikan. Artikel konseptual ini menempatkan kembali Dharma Pengabdian melalui kerangka prinsip dan nilai yang meliputi relevansi kontekstual, inklusivitas partisipatif, keberlanjutan berbasis potensi lokal, kolaborasi berkeadilan, dan inovasi sosial. Kerangka ini diusulkan sebagai landasan desain PKM yang tidak hanya menghasilkan solusi, tetapi juga membangun relasi pengetahuan yang setara antara kampus dan komunitas. Pembahasan menyoroti pergeseran paradigma PKM dari model intervensi top-down menuju *co-creation*, penguatan tata kelola kolaboratif berbasis pentahelix, serta integrasi proses akademik seperti *project-based learning* tanpa menempatkan masyarakat sebagai objek praktik mahasiswa. Selain itu, artikel ini mengkritisi kecenderungan penempelan PKM dengan Sustainable Development Goals, dan menawarkan pendekatan pemetaan dampak yang lebih akuntabel. Dengan menegaskan bahwa legacy PKM bukan sekadar reputasi institusional, tetapi jejak perubahan sosial yang dapat diwariskan, ditransfer, dan direplikasi, artikel ini memberikan kontribusi konseptual berupa model pemaknaan ulang PKM sebagai praktik sosial, instrumen keadilan pengetahuan, dan wujud komitmen perguruan tinggi dalam membangun masyarakat berdaya secara berkelanjutan.

Kata kunci— PKM berdampak, kesejahteraan masyarakat, Tri Dharma, prinsip dan nilai, legacy kampus, keberlanjutan.

Abstract

Community service (PKM), as one of the institutional dharmas of higher education, is often practiced as a form of structural compliance oriented toward outputs rather than as a measurable mechanism of social transformation. This condition produces a gap between claims of contribution to community welfare and demonstrable, evidence-based impact. This conceptual article repositions the Dharma of Community Service through a framework of principles and values encompassing contextual relevance, participatory inclusivity, locally rooted sustainability, equitable collaboration, and social innovation. The proposed framework serves as a foundation for designing PKM initiatives that not only generate solutions but also foster egalitarian knowledge relations between universities and communities. The discussion highlights a paradigmatic shift from top-down intervention toward co-creation, the strengthening of collaborative governance based on the pentahelix model, and the integration of academic processes such as project-based learning without positioning communities as objects of student practice. In addition, the article critiques the tendency to attach PKM to the Sustainable Development Goals superficially and offers a more accountable approach to impact mapping. By asserting that the legacy of PKM is not merely institutional reputation but a trace of social change that can be inherited, transferred, and replicated, this article provides a conceptual contribution in the form of a model for reinterpreting PKM as a social practice, an instrument of knowledge justice, and a manifestation of higher education's commitment to building empowered communities sustainably.

Keywords— Impactful PKM, community welfare, Tri Dharma, principles and values, institutional legacy, sustainability.

1. PENDAHULUAN

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagai salah satu Dharma Perguruan Tinggi memiliki mandat strategis dalam mewujudkan perubahan sosial yang bermakna. Dalam kerangka Tri Dharma, PkM tidak sekadar pendamping dari pendidikan dan penelitian, tetapi merupakan wahana institusional untuk menghadirkan pengetahuan, inovasi, dan nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, PkM mengemban fungsi ganda: sebagai instrumen penerapan keilmuan dan sebagai mekanisme transformasi sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan (Suryanto et al., 2025). Namun dalam praktiknya, PkM masih kerap direduksi menjadi aktivitas pemenuhan kewajiban administratif, berorientasi laporan, dan menempatkan masyarakat sebagai objek penerima manfaat, bukan sebagai subjek penggerak perubahan.

Kesenjangan antara idealitas dan implementasi tersebut terlihat dari banyaknya kegiatan PkM yang berakhir pada produksi luaran jangka pendek, tanpa memastikan adanya peningkatan kapasitas, perubahan perilaku, penguatan kelembagaan, atau keberlanjutan dampak. Kondisi ini menunjukkan bahwa PkM belum sepenuhnya bekerja sebagai *mekanisme perubahan sosial*, tetapi masih didominasi pola intervensi top-down yang menempatkan kampus sebagai pusat pengetahuan tunggal. Padahal, literatur PkM kontemporer menegaskan pentingnya prinsip partisipasi, pemberdayaan, kesetaraan relasi pengetahuan, dan relevansi kontekstual sebagai basis keefektifan program (Winarno & Aini, 2025).

Selain tantangan implementatif, persoalan berikutnya adalah lemahnya integrasi nilai dalam desain PkM. Banyak program belum bertumpu pada norma dasar seperti keberlanjutan, inklusivitas, kolaborasi berkeadilan, serta penghargaan terhadap potensi lokal. Minimnya kerangka evaluasi berbasis nilai turut menyebabkan keberhasilan program tidak terukur secara komprehensif. Akibatnya, klaim kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sering kali tidak diikuti dengan bukti dampak yang dapat diverifikasi. Temuan dalam abstrak prosiding menguatkan kritik ini: PkM masih sering direkatkan secara seremonial dengan agenda Sustainable Development Goals tanpa pemetaan dampak yang akuntabel dan mendalam.

Pada saat yang sama, dinamika sosial dan perubahan kebutuhan masyarakat menuntut transformasi PkM. Digitalisasi, tuntutan inovasi sosial, dan meningkatnya kompleksitas persoalan masyarakat mensyaratkan model pengabdian yang adaptif dan kolaboratif. Pendekatan pentahelix yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah, bisnis/industri, komunitas, dan media menjadi salah satu kerangka yang mampu memperluas jejaring dan memperkuat tata kelola kolaboratif PkM (Dewi et al., 2025). Di sisi lain, integrasi proses akademik seperti *project-based learning* memberi peluang bagi mahasiswa untuk menjadi aktor pembelajar yang berkontribusi, tetapi dengan catatan penting: masyarakat tidak boleh direduksi sebagai arena praktik mahasiswa, melainkan sebagai mitra setara dalam proses penciptaan solusi. Gambar 1 menunjukkan keterlibatan mahasiswa dalam melakukan perubahan secara terarah.



Gambar 1. Partisipasi Kolaboratif antara Mahasiswa dan Masyarakat Desa Pagelaran

Relevansi PkM semakin jelas ketika dikaitkan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Charles, 2021; Nor, 2010). Namun, agar kontribusi tersebut nyata dan terukur, PkM perlu didudukkan kembali pada prinsip-prinsip yang kuat yaitu relevansi kontekstual, inklusivitas partisipatif, keberlanjutan berbasis potensi lokal, kolaborasi berkeadilan, serta inovasi sosial. Prinsip dan nilai ini menjadi landasan untuk memaknai ulang PkM bukan sebagai kegiatan temporer, tetapi sebagai praktik sosial yang menghasilkan jejak perubahan (*legacy*) yang dapat diwariskan, direplikasi, dan diperkuat lintas generasi. Berangkat dari pemikiran tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengonstruksi pemaknaan kembali Dharma Pengabdian sebagai entitas berbasis prinsip dan nilai yang mampu menghasilkan dampak kesejahteraan yang terukur. PkM diposisikan sebagai *legacy kampus*, yakni jejak kebermanfaatannya yang hidup, berkelanjutan, dan tertanam dalam kehidupan masyarakat. Pemaknaan ini diharapkan dapat memperkuat orientasi strategis perguruan tinggi sebagai pusat solusi sosial yang membumi (Winarno, 2023), sekaligus memastikan bahwa kontribusi akademik memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara inklusif, adil, dan berkelanjutan (Aini & Winarno, 2024).

2. METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan konseptual-deskriptif untuk membangun kerangka teoretis PkM yang berdampak. Pendekatan menempatkan literatur ilmiah sebagai sumber utama dalam merumuskan pola hubungan antar-konsep, bukan melalui pengumpulan data empiris. Secara garis besar, proses analitis dilakukan melalui empat prosedur metodologis: penelusuran literatur, analisis isi, sintesis konseptual, dan evaluasi konseptual. Pendekatan konseptual-deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi, menelaah, dan memetakan gagasan utama mengenai prinsip PkM, pendekatan-metode dalam PkM, kolaborasi multipihak (pentahelix), project-based learning, serta evaluasi partisipatif. Kerangka ini diselaraskan dengan struktur metodologi PkM yang dijelaskan dalam buku *Metodologi Pengabdian kepada Masyarakat* yang memuat pendekatan berbasis hasil penelitian (*Research Results-Based Approach* - RRBA), berbasis kebutuhan (*Needs-Based Approach* - NBA), berbasis potensi (*Potential - Based Approach* - PBA), partisipatif masal (*Massive Participation-Based Approach* - MPBA), kebijakan (*Policy-Based Approach* - PBA), dan teknologi (*Technology-Based Approach* - TBA). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan integrasi lintas inspirasi teoretis sekaligus memberikan landasan sistematis bagi penyusunan model konseptual (Winarno & Aini, 2025). Pada tahap analisis isi digunakan untuk menangkap pola konseptual dominan dari literatur yang ditelaah. Analisis difokuskan pada tema-tema yang konsisten muncul dalam kajian pemberdayaan, partisipasi, modal sosial, perubahan sosial, kolaborasi antar-aktor, dan inovasi komunitas. Analisis isi juga digunakan untuk membaca kecenderungan teoretis dalam pendekatan PkM seperti *problem solving*, *evidence-based practice*, *participatory empowerment*, *capacity building*, *collaborative social action*, dan *appraisal of action* untuk melihat relevansi dan kemungkinan integrasinya dalam model konseptual PkM berdampak. Sintesis konseptual dilakukan dengan menghubungkan hasil analisis isi menjadi sebuah konstruksi teoretis yang lebih utuh. Sintesis ini memungkinkan penggabungan prinsip dasar PkM, pendekatan-metode PkM, kolaborasi pentahelix, dan evaluasi partisipatif ke dalam satu kerangka yang koheren dan sistematis. Evaluasi konseptual dilakukan dengan merujuk pada kerangka evaluasi yang dijelaskan oleh (Winarno & Aini, 2025) meliputi analisis naratif, analisis konten, analisis perubahan perilaku, SWOT, dan *social return on investment* (SROI). Evaluasi ini bertujuan memastikan model konseptual yang dibangun tidak hanya logis secara teoretis, tetapi juga memiliki potensi implementatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil pemaknaan konseptual yang dikaji secara integratif untuk memahami arah penguatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di perguruan tinggi. Pembahasan difokuskan pada bagaimana PkM dapat bertransformasi dari aktivitas yang bersifat administratif menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Analisis dilakukan dengan menekankan relevansi nilai-nilai dasar PkM, kontribusinya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, serta perannya dalam meningkatkan reputasi dan martabat institusi pendidikan tinggi.

Reposisi PkM sebagai Dharma Berdampak

Reposisi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sebagai dharma yang berdampak menekankan pentingnya PkM tidak hanya sebagai kewajiban formal, tetapi sebagai pilar transformasi sosial, ekonomi, dan budaya. Penelitian terbaru

menunjukkan bahwa PkM yang terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan (Hidayah et al., 2023). PkM perlu mengalami penataan ulang orientasi dari sekadar kegiatan seremonial menuju mekanisme strategis yang benar-benar memfasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, PkM tidak cukup hanya diwujudkan melalui kegiatan transfer pengetahuan satu arah, tetapi harus berkembang ke arah co-creation yakni proses penciptaan solusi secara kolaboratif bersama masyarakat berdasarkan kebutuhan riil yang mereka hadapi (Ekowati, 2024). Paradigma ini menempatkan masyarakat bukan sebagai objek penerima, tetapi sebagai mitra yang berkontribusi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pemahaman tersebut selaras dengan peran fundamental perguruan tinggi sebagai agen transformasi sosial yang berkewajiban menghadirkan perubahan dan kebermanfaatan berkelanjutan. Oleh sebab itu, intervensi PkM idealnya dirancang berbasis temuan data kebutuhan (Firmansyah et al., 2024), juga perubahan situasi, peningkatan kapasitas, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Gambar 2 berikut menunjukkan peran akademisi dikalangan masyarakat dalam pemberdayaan sumberdaya yang ada.



Gambar 2. Penguatan Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan SDM di Desa Pagelaran Malang

Prinsip Utama PKM Berkelanjutan

Prinsip utama pengabdian kepada masyarakat berkelanjutan adalah pemberdayaan, partisipasi, kolaborasi, dan integrasi nilai lokal untuk menciptakan dampak jangka panjang dan berkeadilan (Dushkova & Ivlieva, 2024); (Kurniawan et al., 2023). Secara khusus ada lima prinsip fundamental yang menjadi landasan PkM berdampak mencakup relevansi, inklusivitas, inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan. 1) Prinsip relevansi menuntut setiap program PkM untuk bersumber dari persoalan riil dan kebutuhan prioritas masyarakat, bukan dari asumsi akademisi atau sekadar mengikuti agenda institusional. Tanpa relevansi kebutuhan, kegiatan apa pun yang dilakukan berisiko menghasilkan output yang tidak bermanfaat. 2) Prinsip inklusivitas menekankan bahwa intervensi PkM harus dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan, terpinggirkan, dan termarginalkan; kritik terhadap banyak program sebelumnya menunjukkan bahwa dampak PkM kerap terpusat pada kelompok yang sudah kuat secara sosial ekonomi. 3) Selanjutnya, inovasi berfungsi sebagai pendorong pembaruan pendekatan dan pemanfaatan teknologi, sehingga PkM tidak stagnan pada pola pelatihan konvensional, tetapi mampu menciptakan solusi kreatif yang sejalan dengan dinamika digital dan kebutuhan masa depan. 4) Prinsip kolaborasi mengharuskan sinergi antarpemangku kepentingan perguruan tinggi, pemerintah, industri, komunitas, dan media karena intervensi tunggal kampus terbukti tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan sosial yang kompleks (D'Adamo, 2025) tanpa jejaring kolaboratif, dampak PkM akan sulit diperluas dan dipertahankan. 5) Terakhir, keberlanjutan menegaskan bahwa program PkM harus dilengkapi dengan mekanisme tindak lanjut dan evaluasi jangka panjang sehingga manfaatnya tidak hanya berhenti pada saat kegiatan selesai, tetapi benar-benar mendorong perubahan perilaku, peningkatan kapasitas, dan penguatan kesejahteraan masyarakat.

Kelima prinsip tersebut bukan sekadar elemen administratif atau istilah normatif dari PkM, melainkan kerangka konseptual yang apabila dijalankan secara konsisten mampu mengubah PkM menjadi mesin pembangunan sosial yang sejalan dengan capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Sebaliknya, apabila salah satu prinsip diabaikan, PkM berpotensi kembali pada pola seremonial dengan menghasilkan dokumentasi, tetapi gagal menghadirkan dampak sosial yang dapat diukur. Oleh karena itu, pemaknaan kritis terhadap prinsip-prinsip ini diperlukan agar PkM tidak sekadar dilaksanakan, tetapi betul-betul memberdayakan.

Strategi Penguatan Ekonomi Lokal melalui PkM

PkM memiliki potensi strategis dalam mendorong penguatan ekonomi lokal, terutama melalui intervensi yang terarah terhadap pelaku UMKM, pengembangan inkubasi bisnis berbasis komunitas, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa. Penguatan ekonomi lokal melalui program pengabdian kepada masyarakat (PkM) menjadi strategi utama dalam mendorong kemandirian, inklusivitas, dan keberlanjutan ekonomi desa dan komunitas. Berbagai studi menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif, pengembangan kapasitas, dan kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk menciptakan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan (Widhari et al., 2023; Widjaja, 2025). PkM tidak cukup diwujudkan dalam bentuk pelatihan singkat atau kegiatan promosi produk, karena model semacam itu cenderung menghasilkan peningkatan pengetahuan sesaat tanpa menjamin perubahan perilaku atau peningkatan daya saing ekonomi masyarakat. Sebaliknya, PkM harus berperan sebagai instrumen pemberdayaan struktural melalui pendampingan jangka panjang (multiyears) yang memfasilitasi kapasitas manajerial, literasi keuangan, transformasi digital, akses pasar, dan kemitraan bisnis. Pendekatan ini menggeser peran kampus dari sekadar penyelenggara kegiatan menjadi *community problem solver*, yakni aktor yang mampu mengidentifikasi akar persoalan ekonomi masyarakat, merancang intervensi solusi, serta memastikan implementasi yang berdampak nyata dan berkelanjutan. Argumentasi kritis terhadap kecenderungan PkM selama ini menunjukkan bahwa banyak program pemberdayaan ekonomi hanya menargetkan capaian output misalnya jumlah pelatihan, peserta, atau publikasi laporan tanpa mengukur bagaimana intervensi tersebut berkontribusi pada peningkatan pendapatan, produktivitas usaha, atau kemandirian finansial masyarakat. Pendekatan semacam ini secara implisit justru menempatkan UMKM dan komunitas desa sebagai penerima pasif, bukan sebagai subjek pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, strategi PkM yang ideal harus menempatkan masyarakat sebagai mitra setara dalam proses *co-creation*, memadukan kearifan lokal dengan pengetahuan ilmiah, serta menyiapkan kelembagaan ekonomi yang mampu bertahan dan berkembang tanpa ketergantungan pada perguruan tinggi.

Keberhasilan PkM dalam penguatan ekonomi lokal tidak ditentukan oleh banyaknya kegiatan yang terlaksana, tetapi oleh sejauh mana masyarakat mampu menjalankan aktivitas ekonomi secara mandiri setelah pendampingan selesai. PkM yang tidak membangun kapasitas kelembagaan, jejaring pasar, dan kompetensi digital berisiko tinggi hanya menghasilkan euforia jangka pendek tanpa perubahan struktural. Sebaliknya, PkM yang menerapkan strategi pemberdayaan multiyear dengan pendekatan inkubasi bisnis komunitas akan menciptakan transformasi ekonomi yang terukur, berkelanjutan, dan menempatkan kampus sebagai agen perubahan yang relevan bagi masyarakat.

Kolaborasi Multistakeholder sebagai Pengungkit Dampak

Pengalaman implementasi PkM di berbagai daerah menunjukkan bahwa perguruan tinggi tidak dapat memikul tanggung jawab perubahan sosial secara mandiri. Kompleksitas persoalan masyarakat mulai dari kesenjangan digital, keterbatasan akses permodalan, ketimpangan informasi, hingga lemahnya daya saing memerlukan intervensi yang bersifat lintas-sektor. Model kolaborasi pentahelix menjadi kerangka penting untuk memperluas jangkauan dan efektivitas dampak PkM karena menyinergikan kekuatan kampus, pemerintah, industri, komunitas, dan media dalam satu ekosistem pemberdayaan yang saling melengkapi.

Setiap aktor dalam pentahelix memiliki *unique value* yang tidak dapat digantikan oleh aktor lain. Perguruan tinggi menyumbang keilmuan dan inovasi. Pemerintah memastikan kebijakan, dukungan regulasi, dan keberlanjutan program. Industri menyediakan akses pasar, permodalan, dan teknologi. Komunitas memahami konteks lokal sebagai pemilik kebutuhan. Media memperkuat visibilitas serta akselerasi adopsi perubahan sosial. Ketika kelima unsur ini bekerja secara integratif, daya angkat (*leverage*) terhadap keberhasilan PkM meningkat secara eksponensial, bukan linear. Tanpa kolaborasi semacam ini, program PkM berisiko hanya memperbaiki permukaan masalah tanpa menyentuh akar persoalan struktural.

Argumentasi kritis muncul dari praktik PkM sebelumnya yang cenderung menempatkan perguruan tinggi sebagai pusat kegiatan, sedangkan aktor lain hanya dianggap sebagai audiens atau pendukung pasif. Paradigma tersebut terbukti tidak efektif karena perubahan sosial tidak dapat dihasilkan melalui intervensi unilateral. PkM yang tidak memberikan ruang partisipasi bermakna kepada pemangku kepentingan lain akan mengikuti pola *top-down* dan

rentan terhenti setelah kegiatan selesai. Oleh karena itu, kolaborasi multistakeholder bukan sekadar pilihan metode, tetapi menjadi syarat epistemologis bagi keberhasilan PkM khususnya dalam konteks digitalisasi, green innovation, dan peningkatan daya saing UMKM.

Dengan demikian, keberhasilan PkM bukan hanya ditentukan oleh kompetensi perguruan tinggi, tetapi oleh kemampuan kampus untuk mengorkestrasi, mengelola, dan mempertahankan kemitraan lintas-sektor. Kampus yang gagal membangun kolaborasi akan menghadapi keterbatasan sumber daya, minimnya dukungan kebijakan, serta rendahnya skalabilitas dan keberlanjutan program. Sebaliknya, perguruan tinggi yang mampu memfungsikan diri sebagai collaborative hub berpotensi melahirkan perubahan sosial yang lebih masif dan berjangka panjang. Dengan cara ini, PkM tidak hanya menyelesaikan masalah pada level individu atau kelompok usaha, tetapi turut memperkuat ekosistem pembangunan sosial dan ekonomi secara lebih struktural

Peran Teknologi dan Kreativitas Mahasiswa

Pemanfaatan teknologi dalam PkM tidak dapat lagi dipandang sebagai pelengkap kegiatan, melainkan sebagai katalis utama yang menentukan relevansi dan efektivitas program di era digital. Transformasi digital baik dalam bentuk literasi teknologi, e-commerce untuk UMKM, e-government Desa, sistem informasi pelayanan publik, hingga aplikasi berbasis komunitas menjadi instrumen penting untuk mempercepat akses pasar, memperbaiki transparansi layanan, dan meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, teknologi hanya akan berdampak apabila disesuaikan dengan kapasitas digital masyarakat; jika tidak, inovasi sekadar menambah kompleksitas baru dan bukan solusi. Oleh karena itu, teknologi dalam PkM harus berbasis user-centered dirancang sesuai kebutuhan, kebiasaan, dan kemampuan pengguna agar benar-benar memudahkan, bukan membebani.

Diluar aspek teknologi itu sendiri, salah satu pengungkit terbesar keberhasilan PkM terdapat pada keterlibatan mahasiswa. Mahasiswa membawa energi kreatif dan pemikiran baru yang tidak dimiliki struktur birokratis kampus. Melalui *project based learning*, keterlibatan mahasiswa tidak berhenti pada menjadi “asisten kegiatan”, tetapi menjadi *co-designer* program: menyusun konten pelatihan, mengelola branding UMKM, memproduksi materi publikasi, merancang kampanye pemasaran digital, hingga melakukan pendampingan langsung dilapangan. Kreativitas generasi muda dalam membaca tren media sosial, mengemas narasi pemasaran, dan mengoperasikan perangkat digital terbukti mempercepat adaptasi masyarakat terhadap teknologi sesuatu yang sulit dicapai hanya melalui pendekatan akademis formal.

Disisi lain, hubungan kolaboratif antara dosen dan mahasiswa berfungsi sebagai mesin inovasi PkM. Dosen menopang validitas ilmiah dan metodologi, sementara mahasiswa menyuntikkan insting praktis, kecepatan eksekusi, dan kepekaan terhadap perubahan perilaku digital masyarakat. Ketika kolaborasi ini dikelola dengan baik, kampus tidak hanya menghasilkan kegiatan PkM yang produktif, tetapi juga mengamplifikasi branding institusi. Bukti keberhasilan masyarakat, UMKM, atau desa binaan yang kemudian viral di media sosial dan portal berita sering kali bukan hasil publikasi formal kampus, tetapi produk kreativitas mahasiswa.

Secara kritis dapat dinyatakan bahwa kampus yang masih melihat keterlibatan mahasiswa sebagai “tenaga pendukung” justru membatasi skala inovasi PkM. Sebaliknya, perguruan tinggi yang memberi ruang mahasiswa untuk memimpin proses kreatif dan teknologi akan memiliki keunggulan kompetitif. PkM menjadi lebih relevan dengan realitas digital, aktivitas lebih terdokumentasi, publikasi lebih kuat, dan kedekatan kampus dengan masyarakat semakin mengakar. Dengan demikian, teknologi dan kreativitas mahasiswa bukan sekadar komponen pelengkap PkM, tetapi penggerak utama yang menentukan kecepatan, kualitas, serta daya sebar dampak sosial program.

Dampak PKM terhadap Reputasi dan Keberlanjutan Kampus

PkM tidak hanya berperan dalam memberdayakan masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi penting terhadap reputasi akademik perguruan tinggi, memperkuat reputasi kampus dengan menunjukkan komitmen institusi terhadap tanggung jawab sosial, inovasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat (Sondari et al., 2024; Kisambira et al., 2024). Dampak tersebut tercermin melalui peningkatan kinerja akreditasi, bertambahnya publikasi ilmiah, terbentuknya kerja sama lintas lembaga, serta tumbuhnya kepercayaan publik terhadap kampus. Keberhasilan pelaksanaan PkM menjadi indikator kualitas institusi di mata masyarakat, karena semakin besar manfaat sosial yang dirasakan, semakin kuat pula legitimasi perguruan tinggi sebagai pusat pengetahuan yang relevan.

Pandangan ini menantang cara berpikir sebagian perguruan tinggi yang masih memposisikan PkM sebagai tugas administratif semata. Pola tersebut membatasi peluang kampus untuk memperluas dukungan kebijakan, membangun kepercayaan pemangku kepentingan, atau menjalin kolaborasi yang strategis. Sebaliknya, ketika PkM dirancang secara matang dan diarahkan untuk menghasilkan dampak, keuntungan bagi perguruan tinggi akan muncul secara

lebih sistematis, baik melalui peningkatan visibilitas akademik, perluasan jejaring kemitraan, maupun penguatan persepsi publik terhadap kapasitas kampus dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

Dari perspektif keberlanjutan, keberhasilan PkM tidak ditentukan oleh jumlah kegiatan, melainkan oleh keberlangsungan manfaat setelah pendampingan berakhir. Ketika masyarakat terus memanfaatkan sistem digital yang dikembangkan, UMKM tetap tumbuh melalui strategi pemasaran yang dipelajari, atau kelembagaan desa menjadi lebih mandiri, maka PkM telah menghasilkan warisan kebermanfaatan jangka panjang yang memperkuat identitas intelektual perguruan tinggi. Hal ini membedakan PkM berdampak dari PkM seremonial. PkM berdampak bermakna menciptakan perubahan sosial berkelanjutan, sedangkan PkM seremonial berhenti pada dokumentasi aktivitas.

Oleh karena itu, PkM perlu dikelola sebagai bentuk investasi reputasi jangka panjang, bukan sekadar pelaksanaan kewajiban Tri Dharma. Perguruan tinggi yang mampu menghadirkan jejak manfaat nyata akan memperoleh pengakuan bukan hanya melalui piagam atau peringkat, tetapi melalui kepercayaan masyarakat sebagai mitra penting dalam pembangunan sosial.

4. SIMPULAN

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan pilar strategis Tri Dharma yang berperan dalam membangun keberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, kajian dan praktik menunjukkan bahwa banyak program PkM masih berorientasi pada pemenuhan administratif dan belum sepenuhnya menghadirkan dampak jangka panjang. Tulisan ilmiah ini menegaskan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) memiliki posisi strategis sebagai Dharma yang tidak hanya menghubungkan kampus dengan masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Hasil kajian konseptual menunjukkan bahwa reposisi PkM perlu dilakukan dengan menempatkannya pada kerangka prinsip dan nilai yang kuat, meliputi relevansi kontekstual, inklusivitas partisipatif, keberlanjutan berbasis potensi lokal, inovasi sosial, dan kolaborasi berkeadilan. Prinsip-prinsip ini terbukti menyediakan fondasi konseptual yang lebih kokoh dibanding pendekatan PkM konvensional yang selama ini cenderung administratif dan berorientasi output. Temuan penting yang diperoleh dari analisis menunjukkan bahwa PkM yang berdampak hanya dapat terwujud melalui tiga mekanisme utama: (1) pergeseran paradigma dari intervensi top-down menuju co-creation, sehingga masyarakat berperan sebagai subjek sekaligus mitra pengetahuan; (2) penguatan tata kelola kolaboratif berbasis pentahelix, yang memperluas kapasitas intervensi dan meningkatkan keberlanjutan; (3) pemanfaatan teknologi dan kreativitas mahasiswa melalui *project-based learning*, yang mempercepat proses inovasi dan meningkatkan daya ungkit dampak sosial.

Kelebihan pendekatan yang dikonstruksi dalam artikel ini terletak pada kemampuannya menggabungkan pendekatan pemberdayaan, kolaborasi multipihak, inovasi digital, serta evaluasi berbasis nilai secara sistematis. Integrasi tersebut memberikan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi perancangan PkM di perguruan tinggi. Namun demikian, kelemahannya terletak pada sifatnya yang masih konseptual; keberhasilan penerapan tetap bergantung pada komitmen institusi, kapasitas pelaksana, adaptasi konteks lokal, dan kesediaan para pemangku kepentingan untuk membangun relasi pengetahuan yang setara. Selain itu, tantangan muncul terkait ketimpangan kapasitas digital masyarakat, potensi dominasi aktor tertentu dalam kolaborasi, serta risiko menjadikan teknologi sebagai tujuan, bukan alat pemberdayaan.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merekomendasikan beberapa pengembangan PkM ke depan. Pertama, perlu disusun model implementasi multiyear yang memastikan keberlanjutan program melalui penguatan kelembagaan komunitas. Kedua, dibutuhkan mekanisme evaluasi dampak yang lebih akuntabel, seperti analisis perubahan perilaku, *Social Return on Investment* (SROI), dan pemetaan kapasitas komunitas. Ketiga, perguruan tinggi perlu memperkuat posisinya sebagai *collaborative hub* yang mampu mengorkestrasi pentahelix secara inklusif. Keempat, integrasi *project-based learning* harus memastikan bahwa masyarakat tidak menjadi objek praktik mahasiswa, melainkan mitra dalam penciptaan solusi.

Melalui pendekatan prinsip dan nilai ini, PkM dapat berfungsi sebagai legacy kampus, yakni jejak kebermanfaatan sosial yang dapat diwariskan, direplikasi, dan menopang reputasi perguruan tinggi dalam jangka panjang. Dengan demikian, PkM tidak hanya menjadi kewajiban institusional, tetapi menjadi komitmen moral dan intelektual kampus dalam membangun masyarakat yang berdaya, sejahtera, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, yang dikelola oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) 2025 atas pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah (PBW) Ruang Lingkup Pemberdayaan Desa Binaan Tahun Kedua.

DAFTAR RUJUKAN

- Aini, D. N., & Winarno, A. (2024). Preservation of Arts and Culture through Edutourism Village of Mentaraman in Malang East Java. *Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang*, 9(3), 675–685. <https://doi.org/10.26905/abdimas.v9i3.13156>
- Charles, G. (2021). Sustainability of Social Enterprises Involved in Waste Collection and Recycling Activities: Lessons from Tanzania. *Journal of Social Entrepreneurship*, 12(2), 219–237. <https://doi.org/10.1080/19420676.2019.1686712>
- D’Adamo, I. (2025). Sustainable communities: We are the world. *Scientific Reports*, 15(1), 8068. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-91952-7>
- Dewi, A. A. I. P., Puteri, P. Y. A., & Mada, I. G. N. C. W. (2025). Sinergi Pentahelix untuk Pembangunan Berkelanjutan: Pemberdayaan Masyarakat melalui Program KKN-PMM di Kelurahan Tonja. *Journal of Social Service and Empowerment*, 2(2), 18–29. <https://doi.org/10.56743/josse.v2i2.668>
- Dushkova, D., & Ivlieva, O. (2024). Empowering Communities to Act for a Change: A Review of the Community Empowerment Programs towards Sustainability and Resilience. *Sustainability*, 16(19), 8700. <https://doi.org/10.3390/su16198700>
- Ekowati, M. A. S. (2024). Sosialisasi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbudaya Dalam Meningkatkan Pembelajaran Menuju Desa Unggul (Studi Kasus Desa Gedangsasri, Kab Gunung Kidul). *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 2(6), 162–177. <https://doi.org/10.61722/japm.v2i6.2836>
- Firmansyah, H., Riyanti, D., Ariyati, E., M, A. N., Bunau, E., Yunitaningrum, W., Pranata, R., & Sahidi, S. (2024). Socialization of Tri Dharma Monitoring Instruments Higher Education for Study Programs in The Fkip Environment of Tanjungpura University. *Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(4), 1788–1797. <https://doi.org/10.32832/abdidos.v8i4.2496>
- Hidayah, N., Arifin, S., Pratama, D. P. A., Kurniawati, Dominggus, A. T. B., Suprpto, A. A., & Nurcahyanti, A. (2023). Community Empowerment Through Optimizing Local Wisdom as a Support for The Value of Economic Life. *TGO Journal of Community Development*, 1(2), 30–38. <https://doi.org/10.56070/jcd.2023.006>
- Kisambira, A., Khadijah, B., & M, A. A. M. (2024). The Role of University Community Engagement Programs in Influencing Higher Education Outcomes and Community Development: An Insight from Uganda. *Extensive Reviews*, 4(1), 15–28. <https://doi.org/10.21467/exr.4.1.8028>
- Kurniawan, H., Yulianto, Y., Setiawan, R., Mladenov, S. V., & M. Ardiansyah, M. A. (2023). Sustainable Development Through Community Empowerment Based On Local Wisdom. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 41(2), 164. <https://doi.org/10.52155/ijpsat.v41.2.5719>
- Nor, A. (2010). The Challenges of Community based Homestay Programme in Malaysia. *Proceedings of Regional Conference on Tourism Research: The State of the Art and Its Sustainability*, 66–73.
- Sondari, M. C., Hermanu, A. I., Nurlaeli, L., & Artisheila, D. S. (2024). Impact of Community Service on University Performance and Efficiency. *Journal of Science and Technology Policy Management*. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-03-2023-0048>
- Suryanto, A., Diana, R., NurHastuti, R. F., Fitriyah, A., Sulistyanningrum, D. E., Yuwono, A., Sunarso, S., Mirlana, D. E., Rahayuningsih, T., & Jibril, A. O. (2025). Cross-Disciplinary Synergy: The Collaborative Role of

- Lecturers in PKM for Optimizing the Tri Dharma. *Kegiatan Positif: Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 62–69. <https://doi.org/10.61132/kegiatanpositif.v3i2.1980>
- Widhari, C. I. S., Sudarmini, N. M., & Pugra, I. W. (2023). Local Potential Based-Entrepreneurship Development through Community Service Program. *International Journal of Social Science and Human Research*, 06(07). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i7-76>
- Widjaja, H. (2025). Strengthening Village Economies Through Cooperative Business Model Training. *International Assulta of Research and Engagement (IARE)*, 3(1), 43–53. <https://doi.org/10.70610/iare.v3i1.809>
- Winarno, A. (2023). Management Literacy for Improving the Performance of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Managing Local Businesses in Wonosari, Malang. *JURNAL PENGABDIAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.47942/jpttg.v4i3.1473>
- Winarno, A., & Aini, D. N. (2025). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat: Dilengkapi Teknis Penulisan Proposal Dan Artikel PkM*. PT Afanin Media Utama. www.publishing.baitsyariah.id